

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	4
I.3. Maksud dan Tujuan	9
I.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU	13
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SOPD	13
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SOPD	18
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD	22
II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	24
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	26
III.1. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD	26
III.2. Program dan Kegiatan	31
BAB IV PENUTUP	35

SOPD : CAMAT BANGKO KAB. MERANGIN

1	2	3	4
A	PROGRAM/KEGIATAN PADA SETIAP SKPD		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input
			Output
			Outcome
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Input
			Output
			Outcome
		3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Input
			Output
			Outcome
		4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input
			Output
			Outcome
		5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input
			Output
			Outcome
		6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Input
			Output
			Outcome
		7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input
			Output
			Outcome
		8 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Input
			Output
			Outcome

9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input
		Output
		Outcome
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Input
		Output
		Outcome
11	Penyediaan Makan dan Minum	Input
		Output
		Outcome
12	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah	Input
		Output
		Outcome
13	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Input
		Output
		Outcome
14	Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah	Input
		Output
		Outcome

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
		1	Pembangunan Gedung Kantor	Input
				Output
				Outcome
		2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input
				Output
				Outcome
		3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input
				Output
				Outcome
		4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input
				Output
				Outcome

		5	Pengadaan Mebeler	Input
				Output
				Outcome
		6	Pengadaan Komputer	Input
				Output
				Outcome

		7	Pengadaan Alat Studio Komunikasi	Input
				Output
				Outcome
		8	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Input
				Output
				Outcome
		9	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Input
				Output
				Outcome
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input

				Output
				Outcome
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
		1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Input
				Output
				Outcome

5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
		1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input
				Output
				Outcome
		2	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Input
				Output
				Outcome
6	Program Peningkatan Sistem pengendalian Intern Pemerintah		Program Peningkatan Sistem pengendalian Intern Pemerintah	
		1	Pelaksanaan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Input
				Output
				Outcome
		2	Pelaksanaan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kelurahan Pasar Atas Bangko	Input
				Output

				Outcome
7	Program Peningkatan Pengembangan sitem Perencanaan		Program Peningkatan Pengembangan sitem Perencanaan	
		1	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Input
				Output
				Outcome

8	Program Penataan Pelayanan Masyarakat	Program Penataan Pelayanan Masyarakat	
		1 Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Input
			Output
			Outcome
		2 Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Dusun Bangko	Input
			Output
			Outcome
		3 Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pasar Atas Bangko	Input
			Output
			Outcome
		4 Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pematang Kandis	Input
			Output
			Outcome

		5	Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pasar Bangko	Input
				Output
				Outcome
9	Program Optimalisasi Penerimaan Daerah		Program Optimalisasi Penerimaan Daerah	
		1	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB dan BPHTB	Input
				Output
				Outcome
		2	Penyampaian DHKP dan SPT PBB Kelurahan Dusun Bangko	Input
				Output
				Outcome
		3	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB dan BPHTB Kelurahan Pasar Atas Bangko	Input
				Output
				Outcome
		4	Penyampaian DHKP dan SPT PBB Kelurahan Pematang Kandis	Input
				Output
				Outcome
		5	Penyampaian DHKP dan SPT PBB Kelurahan Pasar Bangko	Input
				Output
				Outcome

10	Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Pancasila		Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Pancasila	
		1	Kegiatan MTQ tingkat Kabupaten	Input
				Output
				Outcome
11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	√
		1	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Input
				Output
				Outcome
		2	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kelurahan Pasar Atas Bangko	Input
				Output
				Outcome
12	Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	
		1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Input
				Output
				Outcome
		2	Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan	Input
				Output
				Outcome
		3	Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan Pasar Atas Bangko	Input
				Output
				Outcome
		4	Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan Pematang Kandis	Input
				Output
				Outcome
		5	Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Desa dan kelurahan Pasar Bangko	Input
				Output
				Outcome

		6	Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan dan Aplikasi Profil Desa/kelurahan Dusun Bangko	Input
				Output
				Outcome
		7	Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan dan Aplikasi Profil Desa/kelurahan Pematang Kandis	Input
				Output
				Outcome
		8	Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan dan Aplikasi Profil Desa/kelurahan Pasar Bangko	Input
				Output
				Outcome
13	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Program Penataan Administrasi Kependudukan	
		1	Kegiatan Pelayanan dan Operasional KTP dan Kependudukan	Input
				Output
				Outcome
14	Program Peningkatan Peran Serta dan Gender dalam Pembangunan		Program Peningkatan Peran Serta dan Gender dalam Pembangunan	√
		2	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Input
				Output
				Outcome
15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	
		1	Kegiatan Pemantauan Program Percepatan Perluasan Perlindungan Sosial	Input
				Output
				Outcome
		2	Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Penyaluran Beras Raskin	Input
				Output
				Outcome

16	Program Pengendalian dan Penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal		Program Pengendalian dan Penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal	
		1	Kegiatan Monitoring dan Penertiban SITU	Input
				Output
				Outcome
17	Program Visualisasi Hasil Pembangunan		Program Visualisasi Hasil Pembangunan	
		1	Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan	Input
				Output
				Outcome
18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	√
		1	Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Desa	Input
				Output
				Outcome
		2	Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Desa Dusun Bangko	Input
				Output
				Outcome
19	Program Pendidikan Anak Usia Dini		Program Pendidikan Anak Usia Dini	
		1	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Pasar Bangko	Input
				Output
				Outcome
20	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa	√
		1	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa - Kelurahan Dusun Bangko	Input
				Output
				Outcome
		2	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa - Kelurahan Pematang Kandis	Input
				Output
				Outcome
		3	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa - Kelurahan Pasar Bangko	Input
				Output
				Outcome

		4	Pembinaan Lembaga Adat Desa/kelurahan Dusun Bangko	Input
				Output
				Outcome
		5	Pembinaan Lembaga Adat Desa/kelurahan Pasar Atas Bangko	Input
				Output
				Outcome
		6	Pembinaan Lembaga Adat Desa/kelurahan Pematang Kandis	Input
				Output
				Outcome
		7	Pembinaan Lembaga Adat Desa/kelurahan Pasar Bangko	Input
				Output
				Outcome
		8	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa - Kelurahan Pasar Bangko	Input
				Output
				Outcome
21	Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan		Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan	
		1	Pembinaan 10 Program Pokok PKK Kelurahan Dusun Bangko	Input
				Output
				Outcome
		2	Pembinaan 10 Program Pokok PKK Kelurahan Paasr Atas Bangko	Input
				Output
				Outcome
		3	Pembinaan Program Pokok PKK Kelurahan Paasr Bangko	Input
				Output
				Outcome
		4	Penyelenggaraan Pos pelayanan Terpadu (Posyandu) kelurahan Pematang kandis	Input
				Output
				Outcome
		5	Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) kelurahan Pasar Bangko	Input
				Output
				Outcome
		6	Pelatihan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan - Kelurahan Pematang Kandis	Input
				Output

				Outcome
		7	Pelatihan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan - Kelurahan Pasar Bangko	Input
				Output
				Outcome
22	Program Pengembangan model operasional BKB - Posyandu - PADU		Program Pengembangan model operasional BKB - Posyandu - PADU	
		1	Pengkajian pengembangan model operasional BKB- Posyandu-PADU Kelurahan Dusun Bangko	Input
				Output
				Outcome

**REKAM PENCAPAIAN (RENJA) CAMAT BANGKO
TAHUN 2017**

5

Jumlah Dana	Rp
Jumlah Dokumen Surat yang terselesaikan	Surat
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan lancar	%
Jumlah Dana	Rp
Tersedianya Jasa Telekomunikasi, sumberdaya air dan listrik	bulan
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan lancar	%
Jumlah Dana	Rp
Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang terlunas pajaknya	unit
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan lancar	%
Jumlah Dana	Rp
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	bulan
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan lancar	%
Jumlah Dana	Rp
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Bulan
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan lancar	%
Jumlah Dana	Rp
Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki	bulan
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan lancar	%
Jumlah Dana	Rp
Tersedianya alat tulis kantor	bulan
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan lancar	%
Jumlah Dana	Rp
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan lancar	%

Jumlah Dana	Rp
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan lancar	%
Jumlah Dana	Rp
Jenis Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Media Masa
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan lancar	%
Jumlah Dana	Rp
Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu, Rapat, Lembur dan Harian Pegawai	bulan
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan lancar	%
Jumlah Dana	Rp
Frekwensi Rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	bulan
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan lancar	%
Jumlah Dana	Rp
Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran	orang
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan lancar	%
Jumlah Dana	Rp
Frekwensi Rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	bulan
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan lancar	%

Jumlah Dana	Rp
Jumlah Bangunan Gedung yang tersedia	unit
Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Kantor	%
Jumlah Dana	Rp
Jumlah Kendaran Dinas/ Operasional yang diadakan	unit
Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Kantor	%
Jumlah Dana	Rp
Jumlah Perlengkapan Gedung yang tersedia	unit
Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Kantor	%
Jumlah Dana	Rp
Jumlah Peralatan Gedung yang tersedia	unit
Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Kantor	%

Jumlah Dana	Rp
Jumlah Mebeleur yang diadakan	unit
Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Kantor	%
Jumlah Dana	Rp
Jumlah Komputer yang diadakan	unit
Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Kantor	%

Jumlah Dana	Rp
Jumlah Alat Studio dan Komunikasi yang diadakan	unit
Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Kantor	%
Jumlah Dana	Rp
Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	unit
Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Kantor	%
Jumlah Dana	Rp
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	unit
Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Kantor	%
√	√
Jumlah Dana	Rp

Terlaksananya kegiatan pengadaan pakaian dinas	stel
Meningkatnya Disiplin Aparatur	%
Jumlah Dana	Rp
PNS yang Mengikuti Bimbingan Teknis Fungsional	tahun
Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan PNS	%

Jumlah Dana	Rp
Jumlah Lakip SKPD yang disusun	dokumen
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	%
Jumlah Dana	Rp
Jumlah laporan Keuangan yang disusun	dokumen
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	%
Jumlah Dana	Rp
Laporan Pelaksanaan SPIP	dokumen
Presentase Pelaksanaan Sistem Intern Pemerintah	%
Jumlah Dana	Rp
Terlaksananya kegiatan pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	dokumen

Persentase Pelaksanaan SPIP	%
Jumlah Dana	Rp
Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran	dokumen
Persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%

Jumlah Dana	Rp
Tersedianya Pelayanan Publik di Kecamatan	bulan
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	%
Jumlah Dana	Rp
Tersedianya pelayanan Administrasi Kelurahan Dusun Bangko	bulan
Tersusunnya laporan Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan	%
Jumlah Dana	Rp
Tersedianya pelayanan Administrasi Kelurahan Pasar Atas Bangko	bulan
Tersusunnya laporan Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan	%
Jumlah Dana	Rp
Tersedianya pelayanan Administrasi Kelurahan Pematang Kandis	bulan
Tersusunnya laporan Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan	%

Jumlah Dana	Rp
Tersedianya pelayanan Administrasi Kelurahan Pasar Bangko	bulan
Tersusunnya laporan Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan	%
√	√
Jumlah Dana	Rp
Terlaksananya Program Monitoring dan Evaluasi PBB dan BPHTB	kali
Jumlah laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang diaudited	dokumen
Jumlah Dana	Rp
Terlaksananya Program Monitoring dan Evaluasi PBB dan BPHTB	kali
Jumlah laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang diaudited	dokumen
Jumlah Dana	Rp
Terlaksananya kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah	Kali
Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang diaudited	dokumen
Jumlah Dana	Rp
Terlaksananya Penyampaian DHKP dan SPPT PBB	bulan
Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang diaudited	dokumen
Jumlah Dana	Rp
Terlaksananya Kegiatan Penyampaian DHKP dan SPT PBB	Kali
Jumlah laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang diaudited	dokumen

Jumlah Dana	Rp
Terlaksananya Kegiatan MTQ TK.Kabupaten	kegiatan
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	dokumen
√	√
Jumlah Dana	Rp
Terlaksananya Musrenbang RKPD tepat waktu	kali
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen
Jumlah Dana	Rp
Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan musrenbang RKPD	kali
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen
Jumlah Dana	Rp
Terlaksananya Lembaga Adat dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	bulan
Kawasan Pusat Pertumbuhan di Kecamatan	KSE
Jumlah Dana	Rp
Terlaksananya kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan	kelurahan
Kawasan Pusat Pertumbuhan di Kecamatan	KSE
Jumlah Dana	Rp
Terlaksananya kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan	kelurahan
Partisipasi Musyawarah dalam hubungan Desa	%
Jumlah Dana	Rp
Persentase lomba desa dan kelurahan Unggulan	kelurahan
Kawasan Pusat Pertumbuhan di Kecamatan	KSE
Jumlah Dana	Rp
Terlaksananya kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan	kelurahan
Kawasan Pusat Pertumbuhan di Kecamatan	KSE

Jumlah Dana	Rp
terlaksananya profil desa	dokumen
Kawasan Pusat Pertumbuhan di Kecamatan	KSE
Jumlah Dana	Rp
terlaksananya profil desa	dokumen
Kawasan Pusat Pertumbuhan di Kecamatan	KSE
Jumlah Dana	Rp
Tersusunnya Data Profil Kelurahan Pasar Bangko	dokumen
Kawasan Pusat Pertumbuhan di Kecamatan	KSE
√	√
Jumlah Dana	Rp
Pelayanan dan Operasional KTP dan Administrasi Kependudukan	Orang
Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%
√	√
Jumlah Dana	Rp
Frekwensi Pembinaan Organisasi Perempuan	kali
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%
√	√
Jumlah Dana	Rp
Terlaksananya Pemantauan Program Percepatan Perluasan Perlindungan Sosial	kali
Persentase Penduduk Miskin yang dipenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar	%
Jumlah Dana	Rp
Terlaksananya Monitoring dan Pendampingan Penyaluran Raskin	kali
Persentase Penduduk Miskin yang dipenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar	%

Jumlah Dana	Rp
Jumlah Investasi	juta
Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Penertiban SITU	kali
√	√
Jumlah Dana	Rp
Jumlah Penyelenggaraan Pameran yang diikuti	kali
Terlaksananya kegiatan pameran dan pawai pembangunan	kali
√	√
Jumlah Dana	Rp
Terlaksananya Penyelenggaraan Adm Desa	kali
Terlaksananya Koordinasi Pemerintahan Desa	%
Jumlah Dana	Rp
Usulan dari perangkat Desa/ Kelurahan	kali
Usulan dari perangkat Desa/ Kelurahan	%
√	√
Jumlah Dana	Rp
Program PKK dan Pemanfaat Posyandu yang Terintegritas Bersama PAUD	Orang
Angka Melek Huruf	%
√	√
Jumlah Dana	Rp
Usulan dari perangkat Desa/ Kelurahan	kali
Partisipasi Masyarakat dalam Hubungan Desa	%
Jumlah Dana	Rp
Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Desa Tingkat Kelurahan	kali
Partisipasi Masyarakat dalam Hubungan Desa	%
Jumlah Dana	Rp
Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan	kali
Partisipasi Masyarakat dalam Hubungan Desa	%

Jumlah Dana	Rp
Usulan dari perangkat Desa/ Kelurahan	kali
Partisipasi Masyarakat dalam Hubungan Desa	%
Jumlah Dana	Rp
Terlaksananya Optimalisasi Lembaga Adat Desa	kelurahan
Partisipasi Masyarakat dalam Hubungan Desa	%
Jumlah Dana	Rp
Terlaksananya Optimalisasi Lembaga Adat Desa	kali
Partisipasi Masyarakat dalam Hubungan Desa	%
Jumlah Dana	Rp
Terwujudnya Peningkatan Kinerja LAD/ Kelurahan Pasar Bangko	%
Partisipasi Masyarakat dalam Hubungan Desa	%
Jumlah Dana	Rp
Tersedianya pemberian Stimulasi pembangunan Desa	kelurahan
Partisipasi Masyarakat dalam Hubungan Desa	%
√	√
Jumlah Dana	Rp
pembinaan tentang pkk	kelurahan
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan Desa	%
Jumlah Dana	Rp
Jumlah Kelompok PKK yang di bina	kelurahan
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan Desa	%
Jumlah Dana	Rp
Jumlah Kelompok PKK yang di bina	kelurahan
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan Desa	%
Jumlah Dana	Rp
Terlaksananya Kegiatan posyandu	kali
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan Desa	%
Jumlah Dana	Rp
pembinaan tentang pkk	kali
Terlaksananya Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu bagi Balita dan Ibu Hamil	%
Jumlah Dana	Rp
Jumlah Kelompok Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	Bulan

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan Desa	%
Jumlah Dana	Rp
Terlaksananya Pembinaan Program PKK	Orang
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan Desa	%
√	√
Jumlah Dana	Rp
Tersedianya Pelayanan Posyandu yang lebih baik	unit
Persentase cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin (Merangin Sehat)	%

	5,340,000
2000	
94	
	65,868,000
12	
94	
	5,110,000
1 Unit Roda 4 dan 17 Unit roda 2	
94	
	115,200,000
12	
94	
	18,642,000
12	
94	
	15,017,500
	12
94	
	25,550,000
12	
94	
	9,164,550
12	
94	

	1,110,000
12	
94	
	8,600,000
3	
94	
	13,673,450
12	
94	
	105,630,100
12	
94	
	332,400,000
44	
94	
	25,230,000
12	
94	

50,900,000
1 unit Pembangunan Plang Nama Kantor dan 1 unit Taman Kantor
94
40,720,000
2
94
125,320,000
Pengadaan Gorden, Papan Nama Ruangan, Tralis, AC, Penambahan Daya Listrik, dan Pengadaan Podium Upacara
94
5,150,000
2
94

12,925,000

Meja 1/2 Biro 3 unit, Lemari Arsip 1 unit, Kursi Plastik 25 unit, 1 unit Papan Data

94

59,550,000

Laptop 5 Unit, Komputer PC 2 unit, NoteBook 1 Unit, Printer 2 Unit

94

9,200,000

Stand Microphone 1 unit, Pemasangan Wifi 1 unit, Intermediate Telephone 1 unit, TV LED 1 Unit

94

8,000,000

Pengecatan Pagar dan Gedung Kantor

94

31,552,000

18

94

74,870,000

172
90
45,000,000
1
89

4,260,000
15
93
1,887,000
9
93
4,900,000
1
80
3,118,000
1

80
5,065,000
5
90

50,000,000
12
90
65,994,000
12
93
58,504,100
12
93
60,457,000
12
93

62,961,000

12

93

√

5,070,000

3

8

26,400,000

3

8

16,080,000

12

8

39,580,000

12

8

21,654,000

12

8

√
42,400,000
1
8
√
4,596,500
2
8
8,314,200
1
8
√
6,500,000
12
20
2,605,000
1
20
5,000,000
1
80
6,520,000
1
20
8,381,000
1
20

5,096,000

1

20

10,070,000

1

20

8,212,500

1

20

√

14,692,000

25000

70

√

16,170,600

4

40

√

4,685,000

4

7.2

4,240,000

4

7.2

3,820,000

800998

4

√

15,184,100

1

1

√

3,485,600

3

80

6,679,000

1

85

√

3,000,000

20

97.95

√

6,077,000

1

80

2,550,000

1

90

2,500,000

1

80

6,077,000
1
80
2,680,000
1
80
2,680,000
1
80
3,987,000
70
80
7,052,500
1
80
√
6,252,000
1
80
7,055,700
1
80
7,700,000
1
80
13,200,000
12
80
15,600,000
12
80
4,530,000
13

80
2,254,000

20

80

$\sqrt{\quad}$
4,500,000
5
80

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TRIWULAN I		
			1	2	3
			4		
1	2	3	4		
A	PROGRAM/KEGIATAN PADA SETIAP SKPD				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	√	√	√
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	√
		3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	√	√	√
		4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	√	√	√
		5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	√	√	√
		6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	√	√	√
		7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	√	√	√
		8 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	√	√	√
		9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	√	√	√
		10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	√	√	√
		11 Penyediaan Makan dan Minum	√	√	√
		12 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah	√	√	√
		13 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	√	√	√
		14 Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah	√	√	√
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
		1 Pembangunan Gedung Kantor	√	√	√
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	√	√	√
		2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	√	√	√
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	√	√	√

3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	√	√	√
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Kantor Lainnya	√	√	√
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pendingin	√	√	√
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	√	√	√
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	√	√	√
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Kantor Lainnya -Mesin Rumput	√	√	√
	Pengadaan Mebeler	√	√	√
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubeleur	√	√	√
5	Pengadaan Komputer	√	√	√
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Personal Komputer	√	√	√
	Pengadaan Alat Studio Komunikasi	√	√	√
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Peralatan Jaringan	√	√	√
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	√	√	√
6	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	√	√	√
7	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	√	√	√

3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	√	√	√
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	√
		1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	√	√	√
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
		1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√	√	√
		2	Penyusunan Laporan Akhir Tahun			
6	Program Peningkatan Sistem pengendalian Intern Pemerintah		Program Peningkatan Sistem pengendalian Intern Pemerintah			
		1	Pelaksanaan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			
		2	Pelaksanaan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kelurahan Pasar Atas Bangko			
7	Program Peningkatan Pengembangan sitem Perencanaan		Program Peningkatan Pengembangan sitem Perencanaan			
		1	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran			
8	Program Penataan Pelayanan Masyarakat		Program Penataan Pelayanan Masyarakat			

		1	Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)			
		2	Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Dusun angko			
		3	Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pasar Atas Bangko			
		4	Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pematang Kandis			
		5	Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pasar Bangko			
9	Program Optimalisasi Penerimaan Daerah		Program Optimalisasi Penerimaan Daerah	√	√	√
		1	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB dan BPHTB	√	√	√
		2	Penyampaian DHKP dan SPT PBB Kelurahan Dusun Bangko	√	√	√
		3	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB dan BPHTB Kelurahan Pasar Atas Bangko	√	√	√
		4	Penyampaian DHKP dan SPT PBB Kelurahan Pematang Kandis	√	√	√
		5	Penyampaian DHKP dan SPT PBB Kelurahan Pasar Bangko	√	√	√
				√	√	√
10	Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Pancasila		Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Pancasila			
		1	Kegiatan MTQ tingkat Kabupaten			
11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	√	√	√
		1	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	√	√	√
		2	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kelurahan Pasar Atas Bangko	√	√	√
12	Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
		1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan			
		2	Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan			
		3	Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan Pasar Atas Bangko			
		4	Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan Pematang Kandis			
		5	Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan Pasar Bangko			

		6	Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan dan Aplikasi Profil Desa/kelurahan Dusun Bangko			
		7	Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan dan Aplikasi Profil Desa/kelurahan Pematang Kandis			
		8	Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan dan Aplikasi Profil Desa/kelurahan Pasar Bangko			
13	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Program Penataan Administrasi Kependudukan	√	√	√
		1	Kegiatan Pelayanan dan Operasional KTP dan Kependudukan	√	√	√
				√	√	√
14	Program Peningkatan Peran Serta dan Gender dalam Pembangunan		Program Peningkatan Peran Serta dan Gender dalam Pembangunan	√	√	√
		2	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	√	√	√
15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	√	√	√
		1	Kegiatan Pemantauan Program Percepatan Perluasan Perlindungan Sosial	√	√	√
		2	Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Penyaluran Beras Raskin	√	√	√
16	Program Pengendalian dan Penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal		Program Pengendalian dan Penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal	√	√	√
		1	Kegiatan Monitoring dan Penertiban SITU	√	√	√
				√	√	√
17	Program Visualisasi Hasil Pembangunan		Program Visualisasi Hasil Pembangunan	√	√	√
		1	Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan			
				√	√	√
18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	√	√	√
		1	Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Desa	√	√	√
		2	Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Desa Dusun Bangko	√	√	√
19	Program Pendidikan Anak Usia Dini		Program Pendidikan Anak Usia Dini	√	√	√
		1	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Pasar Bangko	√	√	√
				√	√	√
20	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa	√	√	√

		1	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa - Kelurahan Dusun Bangko			
		2	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa - Kelurahan Pematang Kandis	√	√	√
		3	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa - Kelurahan Pasar Bangko	√	√	√
		4	Pembinaan Lembaga Adat Desa/kelurahan Dusun Bangko	√	√	√
		5	Pembinaan Lembaga Adat Desa/kelurahan Pasar Atas Bangko	√	√	√
		6	Pembinaan Lembaga Adat Desa/kelurahan Pematang Kandis			
		7	Pembinaan Lembaga Adat Desa/kelurahan Pasar Bangko			
		8	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa - Kelurahan Pasar Bangko	√	√	√
				√	√	√
21	Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan		Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan	√	√	√
		1	Pembinaan 10 Program Pokok PKK Kelurahan Dusun Bangko	√	√	√
		2	Pembinaan 10 Program Pokok PKK Kelurahan Pasar Atas Bangko			
		3	Pembinaan Program Pokok PKK Kelurahan Pasar Bangko	√	√	√
		4	Penyelenggaraan Pos pelayanan Terpadu (Posyandu) kelurahan Pematang kandis	√	√	√
		5	Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) kelurahan Pasar Bangko	√	√	√
		6	Pelatihan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan - Kelurahan Pematang Kandis	√	√	√
		7	Pelatihan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan - Kelurahan Pasar Bangko			
				√	√	√
22	Program Pengembangan model operasional BKB - Posyandu - PADU		Program Pengembangan model operasional BKB - Posyandu - PADU	√	√	√
		1	Pengkajian pengembangan model operasional BKB- Posyandu-PADU Kelurahan Dusun Bangko	√	√	√
				√	√	√
			Jumlah Belanja			

JADWAL KEGIATAN									PENANGGUNG JAWAB
TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5			6			7			8
√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Keuangan
√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
									Bagian Sekretariat
								√	Bagian Sekretariat
								√	Bagian Sekretariat
								√	Bagian Sekretariat

√	√	√							
√	√	√	√	√	√	√	√	√	
√	√	√	√	√	√	√	√	√	
√	√	√	√	√	√	√	√	√	
√	√	√	√	√	√	√	√	√	
√	√	√							
√	√	√							
√	√	√	√	√	√	√	√	√	
√	√	√	√	√	√	√	√	√	
√	√	√	√	√	√	√	√	√	
√	√	√	√	√	√	√	√	√	
√	√	√							
√	√	√	√	√	√	√	√	√	
√	√	√	√	√	√	√	√	√	
√	√	√	√	√	√	√	√	√	
√	√	√	√	√	√	√	√	√	
√	√	√	√	√	√	√	√	√	
√	√	√							
√	√	√							

RENCA

SOPD : CAMAT BANGKO KAB. MERANGIN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	
A	PROGRAM/KEGIATAN PADA SETIAP SOPD		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input Output Outcome
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input Output Outcome
		3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input Output Outcome
		3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Input Output Outcome
		4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input Output Outcome
		5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input Output Outcome
		6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input Output Outcome
		7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input Output Outcome
		8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input

				Output
				Outcome
		9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Input
				Output
				Outcome
		10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input
				Output
				Outcome
		11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Input
				Output
				Outcome
		12	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Input
				Output
				Outcome
		13	Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah	Input
				Output
				Outcome
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Input
				Output
				Outcome
		2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Input
				Output
				Outcome
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Input
				Output
				Outcome
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	3	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Input
				Output
				Outcome
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD	Input
				Output
				Outcome
		4	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Input

				Output
				Outcome
6	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1	Pelaksanaan kegiatan Sistem pengendalian Intern pemerintah	Input
				Output
				Outcome
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan	2	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Input
				Output
				Outcome
8	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya.	1	Pemantuan program percepatan perluasan perlindungan sosial	Input
				Output
				Outcome
		1	Fasilitasi dan pendampingan penyaluran beras Raskin	Input
				Output
				Outcome
9	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1	Pelayanan dan operasional KTP dan kependudukan	Input
				Output
				Outcome
10	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Input
				Output
				Outcome
		1	Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan	Input
				Output
				Outcome
11	Program Visualisasi Hasil Pembangunan	1	Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan	Input
				Output

				Outcome
12	Program Pengendalian dan Penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal	1	Monitoring dan penertiban SITU	Input
				Output
				Outcome
13	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	1	Fasilitas penyelenggaraan administrasi desa	Input
				Output
				Outcome
14	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Input
				Output
				Outcome
15	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Input
				Output
				Outcome
16	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	1	Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Input
				Output
				Outcome
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB	Input
				Output
				Outcome
18	Program Peningkatan Toleransi Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai –nilai Keagamaan	1	Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten	Input
				Output
				Outcome



**NA KERJA (RENJA) CAMAT BANGKO
TAHUN 2016**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA
4	5	6
Jumlah Dana	Rp	535,000
Jumlah Dokumen Surat yang terselesaikan	Surat	950
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	93
Jumlah Dana	Rp	11,400,000
Tersedianya Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tahun	1
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	93
Jumlah Dana	Rp	2,600,000
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terlunasi Pajaknya	Unit	8
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	93
Jumlah Dana	Rp	15,017,500
Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki	Unit	8
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	93
Jumlah Dana	Rp	54,000,000
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	93
Jumlah Dana	Rp	5,841,100
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	93
Jumlah Dana	Rp	15,206,000
Tersedianya Alat Tulis Kantor	item	29
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	93
Jumlah Dana	Rp	10,140,600
Jumlah jenis barang Cetakan dan Penggandaan	jenis	10
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	93

Jumlah Dana	Rp	5,780,000
Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Media Massa	3
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	94
Jumlah Dana	Rp	13,673,450
Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai/ Pasien/ Tamu	Bulan	12
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	93
Jumlah Dana	Rp	90,840,000
Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	bulan	12
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	93
Jumlah Dana	Rp	149,400,000
Tersedianya Tenaga Administrasi dan teknis Perkantoran	Orang	20
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	93
Jumlah Dana	Rp	34,358,700
Frekuensi koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan	Bulan	12
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	93
Jumlah Dana	Rp	40,900,000
Jumlah Kendaraan yang diadakan	Unit	3
Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kerja aparatur	%	93
Jumlah Dana	Rp	12,350,000
Jumlah kendaraan yang dipelihara	Unit	9
Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kerja aparatur	%	93
Jumlah Dana	Rp	29,990,000
Jumlah Pakaian dinas dan atributnya yang diadakan	Stel	38
Meningkatnya disiplin aparatur	%	90
Jumlah Dana	Rp	22,500,000
Jumlah PNS yang mengikuti Bintek Tekhnis Fungsional	Orang	5
Peningkatan Kompetensi Pegawai	%	80
Jumlah Dana	Rp	4,260,000
Jumlah LAKIP SKPD yang disusun	eksemplar	24
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	%	93
Jumlah Dana	Rp	1,437,000

Jumlah laporan yang disusun	Dokumen	1
Tersusunnya laporan tahunan	%	93
Jumlah Dana	Rp	5,600,000
Laporan Pelaksanaan SPIP	Dokumen	1
Presentase Pelaksanaan Sistem intern Pemerintah	%	80
Jumlah Dana	Rp	5,587,500
Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran yang disusun	eksemplar	50
Pengembangan pelayanan publik dengan sistem e-planning	Sudan/Blm	Sudah
Jumlah Dana	Rp	4,900,000
Pemantauan Program Percepatan Perluasan Perlindungan Sosial	kali	4
Persentase penduduk Miskin	Sudan/Blm	Sudah
Jumlah Dana	Rp	4,240,000
Fasilitasi dan Pendampingan Penyaluran Raskin	kali	4
Persentase penduduk Miskin	Sudan/Blm	Sudah
Jumlah Dana	Rp	12,592,000
	jiwa	25,000
Rasio Penduduk Ber Ktp Terhadap Penduduk Wajib Ktp	Sudan/Blm	Sudah
Jumlah Dana	Rp	5,587,500
	eksemplar	50
Terlaksananya Lembaga Adat Kecamatan Bangko	Sudan/Blm	Sudah
Jumlah Dana	Rp	2,825,000
	kali	4
Kawasan Pusat Pertumbuhan di kecamatan	Sudan/Blm	Sudah
Jumlah Dana	Rp	15,159,100
	kali	1

Persentase Penyelenggaraan Pameran Ekspo	Sudan/Blm	Sudah
Jumlah Dana	Rp	6,904,100
	kali	4
Terbitnya SITU	Sudan/Blm	Sudah
Jumlah Dana	Rp	5,768,500
	kali	3
Terlaksananya Koordinasi pemerintah desa	Sudan/Blm	Sudah
Jumlah Dana	Rp	5,587,500
	kali	4
Partisipasi Angkatan kerja Perempuan	Sudan/Blm	Sudah
Jumlah Dana	Rp	4,596,500
	kali	2
Tersedianya Dokumen perencanaan pembangunan daerah		
Jumlah Dana	Rp	49,000,000
	Bulan	12
Tersedianya Pelayanan Administrasi kecamatan		
Jumlah Dana	Rp	5,587,500
	kali	3
Jumlah Dokumen Keuangan daerah		
Jumlah Dana	Rp	
	kali	

	Sudan/Blm	Belum
--	-----------	-------

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T., karena atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga dapat tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Bangko Kabupaten Merangin Tahun 2017.

Penerbitan buku Rencana Kerja (Renja) ini bertujuan untuk menginformasikan tentang Rencana Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Bangko Kabupaten Merangin Tahun 2017 dan sekaligus jadwal pelaksanaannya. Selain itu dengan diterbitkan buku ini diharapkan dapat menjadi acuan seluruh staf Kantor Camat Bangko Kabupaten Merangin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam penyusunan buku ini. Selanjutnya juga kami menyadari bahwa buku ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu apapun bentuk saran dan kritik yang disampaikan akan kami terima dengan senang hati guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga penerbitan buku ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang memerlukannya.

Bangko, September 2017

CAMAT,

ANDRIE FRANSUSMAN, S.STP

NIP. 19790226 199711 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa kedudukan Kecamatan adalah sebagai perangkat daerah yang merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tanpa terkontaminasi oleh unsur-unsur politik praktis yang berkembang di masyarakat.

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan pemerintahan dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

1. Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Pemerintah Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang terpadu.
2. Pembinaan Pemerintah Kelurahan.
3. Pembinaan Ketentraman dan ketertiban wilayah.
4. Pembinaan Kesejahteraan Rakyat.
5. Penyusun Program dan pembinaan administrasi.

Dalam melaksanakan tugas Camat dibantu oleh:

- a. Sekretaris Kecamatan
- b. Seksi Pemerintahan
- c. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pelayanan Umum
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Dalam melaksanakan tugas operasional pelayanan Administrasi Kecamatan, Sekretaris dibantu oleh :

- a. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pelaksanaan tugas dan fungsi, kecamatan mengadakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait sehingga dapat mencapai hasil kerja yang optimal.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan
BangkoKabupaten Merangin Tahun 2017 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Desa.
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
9. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedomana Organisasi dan Perangkat Desa.
10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Keppres Nomor 16 Tahun 1994 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Proyek Pembangunan.
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
14. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengurusan dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/xi/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah 2004-2008.

-
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.
 19. Peraturan Bupati Merangin Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat dalam Kabupaten Merangin.

1. Visi dan Misi

Tujuan pembangunan Kabupaten Merangin telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Berdasarkan Visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Merangin, maka Pemerintah Kecamatan Bangko mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Merangin dengan mengemban visi dan misi sebagai berikut :

1.1 Visi

Dalam mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap satuan kerja, kantor camat bangko mempunyai VISI yaitu: ***“Terwujudnya Pelayanan Prima dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka BERBENAH Menuju Merangin Emas 2018”***.

1.2 Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi kantor Camat Bangko. Misi adalah sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sehingga akan memberikan arahan jangka panjang, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Adapun Misi kantor camat bangko adalah :

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur dalam mewujudkan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
2. Meningkatkan usaha mewujudkan situasi wilayah yang kondusif.
3. Meningkatkan peran aktif kelembagaan sosial, ekonomi, dan budaya.

Misi Pertama Meningkatkan sumber daya manusia aparatur dalam mewujudkan tugas-tugas dibidang pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan masyarakat yang profesionalisme dalam menyelenggarakan Organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Misi Kedua Meningkatkan usaha mewujudkan situasi wilayah yang kondusif dalam mengoptimalkan Sumber daya yang ada.

Misi Ketiga Meningkatkan peran aktif kelembagaan social, ekonomi, dan budaya dalam mewujudkan masyarakat yang bersih, rapi, indah dan aman (beriman).

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 50);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- i. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

-
- j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

-
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

-
- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 657, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4780);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4811);
 - x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
 - y. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 06);
 - z. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 01);
 - aa. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 02) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008–2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03);
 - ab. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin

Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);

ac. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Merangin Tahun 2014–2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);

ad. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10).

ae. Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 40 Tahun 2016 tentang Ketentuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 40).

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin tahun 2017 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2017, sedangkan tujuan adalah:

1. Acuan Kecamatan Bangko dalam Pelayanan masyarakat Kabupaten Merangin tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Merangin.
2. Merumuskan program dan kegiatan Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin selama tahun 2017.

I.4. SISTEMATIKAPENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Tahun 2017, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Tahun 2017, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang Renja SOPD, Proses Penyusunan Renja SOPD, Keterkaitan antar Renja SOPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SOPD dengan Renja.

2.1 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Kecamatan Bangko Tahun 2017.

3.1 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SOPD.

4.1 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SOPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SOPD

Menjelaskan tentang pemuatan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SOPD

tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SOPD sudah disahkan. selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SOPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SOPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SOPD

Berisikan tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin yang merupakan salah satu organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008, serta kajian terhadap kondisi umum perencanaan saat ini yang berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD

Berisikan uraian mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan SOPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SOPD.
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SOPD.
- Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang

direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SOPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SOPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SOPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SOPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SOPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SOPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SOPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

-
- Rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindaklanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SOPD

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Bangko tersebut. Tercapaitidaknya pelaksanaan

kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin selama tahun 2016 dan perkiraan target untuk tahun 2017. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2015

Anggaran Tahun 2015 Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin sebesar Rp. 2.594.991.000,- (termasuk perubahan) dengan 18 program dan 37 kegiatan. dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 2.413.605.610,-. Anggaran ini digunakan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 1.164.491.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.045.985.061,- atau sebesar 89,82% dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.1.430.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.367.620.549,- atau 95,60%, dengan demikian secara keseluruhan capaian kinerja Keuangan sebesar 93,01%. Penyerapan anggaran terendah yaitu terjadi pada kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan penyerapan anggaran sebesar 55 % dari total anggaran sebesar Rp.11.400.000,-.
2. Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah dengan penyerapan anggaran sebesar 74% dari total anggaran sebesar Rp.8.175.000,-.
3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan penyerapan anggaran sebesar 73% dari total anggaran sebesar Rp.1.140.000,-.

Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2015 tidak dapat terealisasi 100% yang disebabkan adanya efisiensi belanja dan adanya kebijakan-kebijakan yang bersifat *urgent* sehingga ada beberapa program/kegiatan yang mengalami perubahan anggaran, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut memerlukan penyesuaian-penyesuaian.

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2016

Anggaran tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2016 dengan usulan sebesar Rp. **1.765.860.192,-** terurai dalam **17** program dan **34** kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan Sumber Daya Informasi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, serta memperhatikan Perkembangan Global. Maksud dari perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Kecamatan Bangko Daerah Kabupaten Merangin sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis, dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun secara global.

Rencana strategis yang disusun oleh Kecamatan Bangko merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan Kekuatan (***strenghts***), Kelemahan (***weakness***), Peluang (***opportunities***), dan Tantangan (***threats***) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam

kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja(RENJA) tahunan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2016, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bangko sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Adanya gangguan perekonomian yang tidak diperkirakan sebelumnya, baik secara Eksternal maupun Internal;
- c. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- d. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
- e. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan dalam merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas dari program/kegiatan;
- f. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin tahun 2014-2018, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Rencana strategi merupakan salah satu metode dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. karena itu pada rencana strategi ini akan digambarkan upaya-upaya yang akan ditempuh Kantor Camat Bangko dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya berikut dengan pendukungnya sebagai pelaksana pemerintahan.

Pelayanan dan pembangunan dalam lingkungan Kecamatan Bangko dalam mewujudkan amanat yang diembannya. Sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dari konseptual yang diembannya, dilakukan penjabaran secara operasional kedalam bentuk-bentuk yang lebih aplikatif dan mengarah pada sasaran yang akan dicapai. Dari perumusan tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan diatas, maka langkah atau tindakan selanjutnya akan dilakukan penuangan kedalam kebijakan, program dan kegiatan secara tahunan. Penerapan pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan titik akhir dalam pengukuran setiap kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan tiap tahunnya.

Kebijakan merupakan penjabaran dari cara mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari Kantor Camat Bangko untuk menjadi

penduan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Karena itu, kebijakan yang akan dilaksanakan Kantor Camat Bangko pada dasarnya merupakan satu kesatuan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Merangin. Karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan operasionalisasi pencapaian sasaran yang diinginkan. Adapun kebijaksanaan yang ditetapkan Kantor Camat Bangko antara lain :

1. Meningkatkan peranan system informasi dan publikasi hasil-hasil dan dampak pembangunan daerah.
2. Melakukan penjangingan aspirasi dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur desa/ kelurahan.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara stake holders dalam pengelolaan SDA dan potensi pajak.
6. Meningkatkan kondisi yang kondusif dan demokratis dengan melibatkan peran serta masyarakat secara luas.
7. Meningkatkan mutu kesehatan dasar.

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SOPD

A. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin merupakan salah satu organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016, Bappeda Kabupaten Merangin mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, terdiri dari :

-
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - e. Seksi Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Merangin, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan tugas pembantuan, kemudian Bappeda mempunyai fungsi:

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Merangin;
2. Camat adalah pemimpin atau koordinator penyelenggaraan perwakilan di wilayah kerja Kecamatan dalam Kabupaten Merangin yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

B. Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2016 Pasal 2 tentang Kecamatan Kecamatan merupakan unsur staf dipimpin oleh Camat yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SOPD

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang ketentuan, kedudukan, susunan organisasi, tupoksi Kecamatan Kabupaten Merangin Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- 1) Menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas pemerintahan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila.
 - b. Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - e. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.
 - f. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Koordinasi Pelaksanaan tugas Antarinstansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk Menyelesaikan Permasalahan yang Timbul dengan

memperhatikan Prinsip demokrasi, hakasasi Manusia, pemerataan, Keadilan, Keistimewaan, dan kekhususan, potensi serta Keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. Pengembangan Kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila, dan
- i. Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh intansi Vertikal.

2) Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.

3) Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Merangin untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitasi
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

-
- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Camat menyelenggarakan fungsi :
- 2) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
 - 3) Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Merangin.

B. Sumber Daya Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.

C. Sarana dan Prasarana

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
2. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin. rencana kerja (RENJA) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, disamping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya,

melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SOPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SOPD maupun berdasarkan hasil Pengumpulan Informasi SOPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SOPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada Perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Merangin. Dalam mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap satuan kerja, kantor camat bangko mempunyai VISI yaitu : ***“Terwujudnya Pelayanan Prima dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka BERBENAH Menuju Merangin Emas 2018”***.

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bangko sebagai berikut :

1.1 Tujuan dan Sasaran

1.1.1 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan visi Pemerintah Kecamatan Bangko adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Pelayanan yang cepat, tepat dan adil tanpa mengabaikan prosedur kepada seluruh masyarakat Kecamatan Bangko.

-
- b. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat Kecamatan Bangko dalam mendukung Program Pembangunan Pemerintah Bangko dalam setiap aspek kehidupan.
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat Kecamatan Bangko dalam mengoptimalkan Sumber daya yang ada untuk meningkatkan Kesejahteraannya.
 - d. Mewujudkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang baik dalam rangka memberikan kepuasan bagi masyarakat.
 - e. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional didalam menyelenggarakan Organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

1.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Terlaksananya pelayanan administrasi secara tertib dan lancer.
- b. Terwujudnya tanggung jawab PNS dalam melaksanakan tugas sesuai Tupoksi.
- c. Tersediannya informasi tentang realisasi laporan keuangan.
- d. Terpenuhinya data profil Kecamatan dan kelurahan yang akurat.
- e. Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kecamatan dapat berjalan dengan baik.
- f. Terpeliharanya bangunan dan halaman kantor.
- g. Terpeliharanya kualitas Sarana dan Prasarana kantor
- h. Terwujudnya Pelaksanaan kegiatan Operasioanal Kecamatan.
- i. Terlaksananya pelayanan Jamuan Rapat dan Operasional secara optimal.
- j. Terlaksananya program kegiatan yang Sinergis.
- k. Tercapainya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

III.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Merangin Meliputi :

A. PROGRAM UTAMA

1. Program Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah

Program ini bertujuan Pelayanan Masyarakat secara umum dengan indikator Persentase Penyelesaian Penataan Batas Administrasi Kabupaten dan Kecamatan.

B. PROGRAM PENUNJANG

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi yang efektif dan efisien terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai Efektivitas dan Efisiensi.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparat pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pakaian dinas, batik maupun pakaian olahraga bagi pegawai Kecamatan Bangko.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SOPD secara optimal yang transparan berbasis *e-planning*, *e-budget* dan *e-audit*.

6. Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Program ini bertujuan untuk terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.

7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pengembangan sistem Penganggaran dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bangko yang telah terencana.

8. Program Visualisasi Hasil Pembangunan Daerah

Program ini bertujuan untuk memberikan penyebarluasan informasi berdasarkan hasil Kecamatan Bangko

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para Pelaku-Pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya Merembes Kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output **Rencana Kerja** Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin adalah **Program Tahunan** Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Bangko, sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, Rencana Kerja (RENJA) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Kabupaten Merangin. Rencana Kerja (RENJA) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.